

MISI 7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas
TUJUAN RPJMD	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Aparatur yang Melayani IK: Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN RPJMD	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel IK: 1. Opini Laporan Keuangan 2. Nilai Evaluasi SAKIP

Tujuan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda
Indikator Tujuan	1. Opini Laporan Keuangan 2. Nilai Evaluasi SAKIP

Sasaran	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah
Indikator Sasaran	Tingkat kapabilitas APIP	Tingkat maturitas SPIP
Definisi Operasional	hasil QA kapabilitas APIP oleh BPKP	hasil evaluasi maturitas SPIP oleh BPKP

(sasaran eselon III)	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan APIP	Meningkatnya perumusan kebijakan pengawasan internal (APIP)	Meningkatnya Kompetensi SDM	Meningkatnya perumusan Kebijakan Pengawasan Pemda	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi SPIP
Indikator Sasaran Eselon III	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 2. Persentase realisasi PKPT 3. Persentase realisasi kebijakan pengawasan (Permendagri)	Persentase perumusan kebijakan pengawasan internal (APIP) yang dihasilkan	Persentase pegawai yang mengikuti diklat kompetensi	1. Persentase perumusan kebijakan terkait pengawasan Pemda yang dihasilkan 2. Persentase keterlibatan APIP dalam Perumusan Kebijakan Pemda (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	1. Nilai indeks penerapan manajemen risiko (MRI) 2. Nilai Indeks Efektivitas Pecegahan Korupsi (IEPK) 3. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP 4. Persentase pemberian <i>Consulting</i>
Definisi Operasional	TLHP APIP dan BPK yang diselesaikan/ total TLHP APIP dan BPK dikali 100% persentase rencana PKPT yang direalisasikan terhadap PKPT yang disusun realisasi jenis pengawasan yang dilaksanakan terhadap kebijakan pengawasan (Permendagri)	realisasi jumlah perumusan kebijakan pengawasan internal (APIP) yang dihasilkan dibagi rencana perumusan kebijakan pengawasan internal (APIP) dikali 100%	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dalam satu tahun dibagi total pegawai	1. realisasi jumlah perumusan kebijakan terkait pengawasan Pemda yang dihasilkan dibagi jumlah rencana perumusan kebijakan terkait pengawasan Pemda dikali 100% 2. Jumlah draft aturan yang ditelaah dibagi jumlah usulan telaah draft aturan dikali 100%	1. Hasil penjaminan kualitas SPIP terintegrasi (MRI, IEPK dan penyelenggaraan SPIP) 2. Jumlah realisasi <i>consulting</i> dibagi jumlah permintaan <i>consulting</i> dikali 100%

Sasaran Eselon IV	Terlaksananya pengawasan kinerja	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya ya reu laporan keuangan	Terlaksananya reu laporan kinerja	Terlaksananya pengawasan umum kab/kota	Terlaksananya kerjasama pengawasan internal	Terlaksananya monitoring APIP dan BPK	Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian daerah	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Internal (APIP)	terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan Internal (APIP)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Pemda	terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan Pemda	terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	terlaksananya Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, asistensi serta Penjaminan kualitas SPIP terintegrasi dan Pecegahan Korupsi	terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Indikator sasaran Eselon IV	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja yang diterbitkan	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan yang diterbitkan	jumlah laporan keuangan yang direviu	jumlah laporan kinerja yang direviu	jumlah hasil pengawasan umum kab/kota	jumlah hasil kerja sama pengawasan internal dengan stakeholder	Laporan Monitoring APIP dan BPK	% penanganan penyelesaian kerugian daerah yang diproses/ditindaklanjuti	% pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti	jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan internal (APIP) yang dirumuskan	jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan internal (APIP) yang dirumuskan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan Pemda yang dirumuskan	jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan Pemda yang dirumuskan	jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang diterbitkan	jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB yang dihasilkan	Jumlah laporan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, asistensi serta Penjaminan kualitas SPIP terintegrasi yang dihasilkan:	jumlah laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang dihasilkan
Definisi Operasional	jumlah laporan audit, reu, monitoring dan evaluasi kinerja pemda	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan yang diterbitkan	jumlah LK PD yang direviu	jumlah Laporan Kinerja Pemda (LKIP Pemda) yang direviu	jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan umum	jumlah kegiatan dalam rangka pengawasan internal dengan stake holder internal	Laporan Monitoring APIP dan BPK	jumlah kerugian yang disetor/ total temuan kerugian dikali 100%	Jumlah pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu/ total pengawasan tujuan tertentu yang diterima dikali 100%	jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan internal (APIP) yang dirumuskan	jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan internal (APIP) yang dirumuskan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan Pemda yang dirumuskan	jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan Pemda yang dirumuskan	jumlah laporan Koordinasi, Pendampingan, dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang diterbitkan	jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB yang dihasilkan	1. Laporan asistensi SPIP 2. Laporan QA SPIP 3. Laporan Pendampingan MCP KPK dan strans PK 4. Laporan Saber Pungli 5. Laporan pengendalian gratifikasi	1. Laporan Pembinaan ZI 2. Laporan pendampingan LHKPN dan LHKASN 3. Laporan Benturan Kepentingan

